

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern tanggal 19 Juni 2014 Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 mengenai pendapatan asli daerah yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing Tahun Anggaran 2013 minimal senilai \$5.326.075 USD (lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima dolar Amerika) berpotensi hilang, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

Mengoordinasikan dan mendorong segera diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

KEDUA

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Widodo

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Inspektur Provinsi DKI Jakarta